

# IMPLEMENTASI PROGRAM WATER, SANITATION, AND HYGIENE (WASH) OLEH UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DI SULAWESI SELATAN

Oleh : Christina Oktaviani Simanjuntak

Pembimbing : Dr.Yessi Olivia,S. IP.,M.Intrel

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Univertas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRACT

*The problem of sanitation is an international problem, Indonesia is one of the developing countries that tend to lack knowledge about the importance of sanitation. Poor water sanitation, hygiene causes the death of 1.5 million toddlers due to diarrhea every year. To achieve universal access, Indonesia and the United Nations International Emergency Children's Fund (UNICEF) collaborate through the Water, Sanitation, and Hygien (WASH) Program to overcome sanitation problems in Indonesia and meet universal access targets. This research aims to explore UNICEF's implementation of the WASH program in addressing sanitation and clean water issues in South Sulawesi. The method used in this research is a qualitative method with primary data collection techniques, namely interviews with resource persons from UNICEF Indonesia and Makassar and secondary with document analysis. This research uses the role theory of international organizations. This theory is used to explain and affirm UNICEF in carrying out its roles based on the values set by international organizations. The results showed that the WASH program implemented by UNICEF in South Sulawesi succeeded in achieving Open Defecation Free (ODF) status in 2021, with the achievement of a decent sanitation target of 91.57% in accordance with the RPJMD and RPJMN. And an increase in safe sanitation of 6.14%. UNICEF plays an important role through policy advocacy, regulatory strengthening, technical assistance and community empowerment, while supporting the government in achieving sustainable sanitation targets in accordance with Sustainable Development Goal 6*

*Keywords: WASH, Sanitation, UNICEF, South Sulawesi, International Organization*

## ABSTRAK

Akses terhadap air bersih dan sanitasi adalah masalah yang mendalam dan kompleks yang masih dihadapi oleh banyak negara berkembang di dunia, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang cenderung kurang memiliki pengetahuan tentang pentingnya sanitasi. Buruknya sanitasi air, kebersihan menyebabkan kematian 1,5 juta balita karena diare setiap tahunnya. Untuk mewujudkan akses universal tersebut Indonesia dan United Nations Internasional Emergency Children's Fund (UNICEF) bekerja sama melalui Program Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) untuk menanggulangi masalah sanitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi program WASH oleh UNICEF dalam mengatasi

permasalahan sanitasi dan air bersih di Sulawesi Selatan Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer yaitu wawancara dengan narasumber dari UNICEF Indonesia dan Makassar dan sekunder dengan analisis dokumen. Penelitian ini menggunakan teori peran organisasi internasional. Teori ini digunakan untuk menjelaskan dan menegaskan UNICEF dalam melaksanakan peran-perannya berdasarkan nilai-nilai yang ditetapkan oleh organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNICEF telah melakukan perannya sebagai aktor yang independen melalui program Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) di Sulawesi Selatan. Dengan melakukan advokasi kebijakan, penguatan regulasi, serta pendampingan teknis bagi pemerintah dalam mengelola program sanitasi. Hingga berhasil mencapai target sanitasi layak sebesar 91,57% sesuai RPJMN serta peningkatan sanitasi aman 6,14. Namun, keterbatasan UNICEF sebagai organisasi internasional bergantung terhadap kerangka kerja sama dengan pemerintah. sehingga butuh komitmen yang kuat antara UNICEF, pemerintah, dan aktor lokal untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 6.

Kata Kunci: WASH, Sanitasi, UNICEF, Sulawesi Selatan, Organisasi Internasional

## Pendahuluan

Isu lingkungan telah menjadi salah satu agenda utama dalam studi Hubungan Internasional sejak abad ke-20. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya degradasi lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesadaran global akan kompleksitas tantangan ekologis yang dihadapi oleh umat manusia. Salah satu permasalahan lingkungan yang krusial adalah masalah air bersih dan buruknya sanitasi yang mengancam kesehatan anak-anak di seluruh dunia. Data menunjukkan bahwa satu dari tiga orang di dunia atau setara dengan 2,2 miliar orang tidak memiliki akses air minum yang aman, hampir lebih dari setengah populasi dunia juga tidak memiliki layanan sanitasi yang aman, dan 2 miliar orang tidak dapat mengakses fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun.<sup>1</sup> Kondisi ini

berdampak pada munculnya berbagai penyakit seperti kolera, diare, disentri, hepatitis A, tifus, dan polio terutama pada anak-anak, dengan lebih dari 505.000 kematian akibat diare setiap tahunnya.<sup>2</sup>

Penanggulangan permasalahan sanitasi di tingkat internasional telah menjadi perhatian global sejak era *Millennial Development Goals* (MDGs) 2000-2015, di mana sanitasi dimuat dalam Goals 7 yaitu "Ensure Environmental Sustainability" atau Memastikan Kelestarian Lingkungan. Target yang ditetapkan adalah mengurangi setengah proporsi penduduk yang tidak memiliki akses ke sanitasi yang layak. Namun, hingga akhir periode MDGs, target tersebut belum mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030, sanitasi dijadikan

---

<sup>1</sup> United Nations, "The Sustainable Development Goals Report 2022," 2022.

---

<sup>2</sup> World Health Organization, "Drinking-Water," 2023.

sebagai Goals 6 (enam) yaitu "*Clear Water and Sanitation*" (Air Bersih dan Sanitasi).<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi tantangan serius dalam hal kualitas air bersih dan sanitasi. Pada tahun 2022, sekitar 250 juta orang di Indonesia masih kekurangan akses terhadap fasilitas sanitasi yang dikelola secara aman. Data UNICEF menunjukkan bahwa hampir 25 juta masyarakat Indonesia masih melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS), baik itu di lapangan, sungai, parit atau pun hutan, yang secara langsung memperburuk kondisi air tanah Indonesia.<sup>4</sup> Kondisi ini diperparah dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menunjukkan bahwa 65% sungai di Indonesia tercemar berat.<sup>5</sup>

Permasalahan sanitasi merupakan ancaman serius bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020, diare menjadi penyebab kematian terbanyak pada kelompok balita umur 12-59 bulan (4,55%) dan masih menjadi masalah utama kedua (14,5%) kematian post neonatal (29 hari-11 bulan) setelah pneumonia (73,9%). Angka kesakitan diare di Indonesia pada tahun 2020 masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 270/1000 penduduk pada semua umur dan

843/1000 penduduk pada balita.<sup>6</sup> UNICEF Indonesia juga melaporkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 140.000 balita meninggal akibat penyakit diare yang disebabkan oleh pengelolaan air limbah yang kurang baik, dengan 93% air limbah yang berasal dari toilet tidak menjalani proses pengolahan di Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT).

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam mengatasi permasalahan ini melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 yang menargetkan terwujudnya 100% air minum layak, 90% akses sanitasi layak, termasuk 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, serta menurunkan angka BABS hingga 0% pada tahun 2024. Dalam implementasinya, pemerintah tidak hanya bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tetapi juga bermitra dengan organisasi internasional seperti *United Nations Children's Fund* (UNICEF).

UNICEF sebagai organisasi internasional di bawah naungan PBB yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, sejak tahun 1953 memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang dan dalam situasi darurat. Fokus UNICEF meliputi program keberlangsungan hidup dan kesehatan anak, pendidikan, perlindungan anak, gizi, air dan

---

<sup>3</sup> ICLEI BRIEFING SHEET, "From MDGs to SDGs: What Are the Sustainable Development Goals?," 2015.

<sup>4</sup> Unicef Indonesia, "Hari Toilet Sedunia 2020: Sanitasi Aman Dan Berkelanjutan Di Tengah Iklim Yang Berubah," 2020, <https://www.unicef.org/indonesia/id/cerita/hari-toilet-sedunia-2020-sanitasi-aman-dan-berkelanjutan-di-tengah-iklim-yang-berubah>.

<sup>5</sup> National Geographical Indonesia, "Air Sungai Di Indonesia Tercemar Berat," 2016.

---

<sup>6</sup> Kemenkes RI Ditjen P2P, "Profil Kesehatan Indonesia," 2021, <https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/profil-kesehatanindonesia/Profil-Kesehatan-2021.pdf>.

sanitasi, serta kebijakan sosial.<sup>7</sup> Salah satu program unggulan UNICEF dalam mengatasi permasalahan sanitasi dan air bersih adalah Program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH). Program ini lahir dari kepedulian lembaga internasional terhadap keadaan lingkungan dan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat terutama di negara-negara berkembang, meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam hal sanitasi, serta menerapkan hak asasi manusia atas air bersih dan sanitasi yang layak.<sup>8</sup>

Indonesia telah menjalin kerja sama dengan UNICEF melalui *Country Program Action Plan* (CPAP) yang bertujuan untuk percepatan pemenuhan hak anak, termasuk di dalamnya program WASH. Kerja sama UNICEF-RI ini memiliki delapan fokus wilayah, diantaranya adalah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Sulawesi Selatan sebagai salah satu wilayah fokus masih menghadapi tantangan kompleks terkait sanitasi dan air bersih. Data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan 2020 mencatat persentase balita dengan stunting di Sulawesi Selatan sebesar 30,59%, lebih tinggi dari prevalensi stunting nasional yang mencapai 26,90%.<sup>9</sup>

Meskipun demikian, hingga tahun 2022, berdasarkan data Kementerian

Kesehatan, di Provinsi Sulawesi Selatan, sejumlah 21 dari 24 kabupaten atau sejumlah 95% wilayah telah dinyatakan bebas dari praktik BABS. Setelah mencapai status sanitasi layak yang ditandai dengan bebas BABS, langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti status sanitasi layak menuju sanitasi aman. Sanitasi aman yang dimaksud meliputi pemisahan air kakus dengan sistem setempat, penyedotan lumpur tinja tercatat dan terjadwal, pengangkutan lumpur tinja yang terkawal, pengolahan lumpur tinja yang efektif, dan pemanfaatan lumpur olahan yang aman bagi lingkungan.<sup>10</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran UNICEF dalam menangani dan mengatasi permasalahan sanitasi dan air bersih di Sulawesi Selatan pada tahun 2020-2024, sejalan dengan implementasi program WASH yang mendukung arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam RPJMN 2020-2024 terkait penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar dan pengembangan lingkungan sehat. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji kondisi sanitasi di Sulawesi Selatan, dampak sanitasi buruk dan kesulitan akses air bersih bagi anak-anak, serta implementasi program WASH UNICEF di wilayah tersebut.

## Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan teori Organisasi Internasional sebagai dasar untuk menjelaskan permasalahan yang dibahas. Organisasi Internasional sebagai aktor dalam

---

<sup>7</sup> UNICEF, "UNICEF Mission Statement," 2024, <https://www.unicef.org/aboutus/mission-statement>.

<sup>8</sup> REACH, "REACH Global Strategy 2020-2024," 2020, [www.reachwater.org.uk](http://www.reachwater.org.uk).

<sup>9</sup> Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, "Laporan Semester 1 Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Selatan," 2024.

---

<sup>10</sup> Halia Asriyani, "Upaya Mewujudkan Sanitasi Aman Di Provinsi Sulawesi Selatan Bersama Program Wash Kerja Sama Unicef Dan Yayasan Bakti (Yayasan BaKTI, 2022)," 2022, 1-5.

hubungan internasional dianggap memberikan keuntungan terhadap negara karena dapat berperan aktif dalam menangani masalah-masalah di negara yang bersangkutan. Organisasi internasional pada dasarnya adalah lembaga yang mempunyai fungsi menghubungkan urusan antarnegara.<sup>11</sup> Organisasi internasional awalnya didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara terjamin dalam konteks hubungan internasional.<sup>12</sup> Untuk dapat mendefinisikan organisasi internasional, harus melihat pada tujuan yang hendak dicapai, institusi-institusi yang ada, dan suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan suatu negara dengan aktor-aktor non-negara.<sup>13</sup>

Pada hakikatnya, organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk sebagai wadah kerjasama suatu negara untuk menjamin kepentingan negara-negara anggotanya. Terdapat beberapa syarat sebuah organisasi dapat disebut sebagai organisasi internasional, di antaranya adalah tujuannya harus bersifat internasional, harus mempunyai anggota di mana setiap anggotanya memiliki hak suara, didirikan berdasarkan anggaran dasar dan harus

mempunyai markas besar demi kelangsungan organisasi, serta orang yang menjalankan tugas organisasi harus terdiri dari berbagai negara.<sup>14</sup> Berdasarkan tipe keanggotaannya, organisasi internasional diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu *Inter-Governmental Organizations* (IGO) yang anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara, dan *Non-Governmental Organizations* (NGO) yang anggotanya terdiri dari kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi dan sebagainya.

UNICEF termasuk dalam kategori IGO dengan jangkauan keanggotaan mencakup seluruh dunia. UNICEF memiliki struktur organisasi yang lengkap dan jelas berdasarkan kesepakatan anggotanya, serta memiliki prioritas untuk mencapai tujuan-tujuannya dan menjalankan fungsi sebagai organisasi internasional yang bergerak memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak. UNICEF membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan umum anak-anak, gizi, pendidikan, dan juga membantu pemulihan kondisi anak-anak. UNICEF juga menyediakan berbagai kebutuhan seperti makanan, pelayanan kesehatan dan pakaian, serta memiliki sejarah yang panjang dalam upaya memberikan bantuan darurat bagi setiap anak.

Clive Archer mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antar anggota-anggota atau pemerintah dengan non pemerintah dari dua negara yang

---

<sup>11</sup> U S Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama* (Prenadamedia Group, 2017).

<sup>12</sup> A L R Bennett, *International Organizations: Principles and Issues* (Prentice-Hall Internat, 1991).

<sup>13</sup> Theodore A Coulombis and James H Wolfe, *Introduction to International Relations: Power and Justice* (Prentice Hall Englewood Cliffs, N.J, 1990).

---

<sup>14</sup> Ibid. Hal 24.

berdaulat atau lebih dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama para anggotanya.<sup>15</sup> Archer menjelaskan bahwa peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu sebagai instrumen di mana organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu, sebagai arena yang merupakan tempat berkumpul dan bertemu anggota-anggotanya untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi, dan sebagai aktor independen di mana organisasi internasional dapat membuat keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh paksaan dari luar organisasi.<sup>16</sup>

UNICEF dalam hal ini berperan sebagai aktor independen yang mempunyai hak-haknya sendiri untuk mengimplementasikan, memonitoring, dan menangani masalah di suatu negara. Posisi UNICEF sendiri adalah sebagai organisasi internasional yang berperan khusus untuk kepentingan hak anak sebagai suatu proses. Untuk menangani masalah sanitasi di Indonesia, UNICEF memberikan layanan perlindungan anak dengan terjun langsung ke lapangan dan menyediakan berbagai bantuan kemanusiaan serta penyediaan layanan kesehatan terutama dalam penyediaan air bersih melalui program WASH (*Water Sanitation and Hygiene*).

Untuk mengkaji fenomena dalam penelitian ini, digunakan tingkat analisis perilaku kelompok yang berfokus pada

mempelajari kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional. Tingkat analisis ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran, penjelasan, dan perkiraan yang akurat tentang perilaku negara.<sup>17</sup> Dalam konteks ini, UNICEF dipandang sebagai kelompok atau organisasi yang memiliki peran signifikan dalam hubungan internasional, khususnya dalam penanganan masalah sanitasi dan penyediaan air bersih di Indonesia.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa konsep penting yang perlu dipahami. Sanitasi didefinisikan sebagai upaya pengawasan faktor-faktor lingkungan fisik manusia yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan fisik manusia, kesehatan maupun kelangsungan hidupnya.<sup>18</sup> WHO (*World Health Organization*) merupakan organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan arah dan kebijakan dalam penanganan kesehatan masyarakat dunia.<sup>19</sup> Sementara itu, UNICEF adalah sebuah Organisasi Internasional yang dibentuk PBB dan memiliki tujuan untuk memberikan bantuan atau pengembangan aktivitas pertumbuhan anak-anak di negara-negara berkembang.

*Water Sanitation and Hygiene* (WASH) merupakan program dukungan pembangunan sektor Air Minum dan

---

<sup>15</sup> Cliver Archer, "International Organisations Third Edition Clive Archer," 2001.

<sup>16</sup> Anak Agung Banyu and Yanyan Mochamad Yani Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2005).

---

<sup>17</sup> Yessi Olivia, "Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional," *Jurnal Transnasional* 4, no. 1 (2013): 896–914.

<sup>18</sup> Hadi Siswanto, "Kamus Populer Kesehatan Lingkungan," 2003.

<sup>19</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "World Health Organization (WHO)."

Penyehatan Lingkungan (AMPL) dalam kerangka kerjasama Pemerintah Indonesia dengan UNICEF. Tujuan Program WASH UNICEF adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak melalui peningkatan pelayanan sektor air minum dan sanitasi yang layak. Program ini sejalan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang merupakan rancangan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk seluruh umat manusia, untuk menjawab berbagai tantangan global yakni kemiskinan, ketidakadilan, perubahan iklim, degradasi lingkungan dan kedamaian serta keadilan.<sup>20</sup>

Isu lingkungan khususnya sanitasi telah menjadi perhatian berbagai sektor baik pemerintah maupun swasta. Pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan UNICEF dalam mengatasi masalah sanitasi, terutama untuk mencegah penyebaran penyakit seperti diare yang merupakan penyakit endemis potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai dengan kematian. Kerjasama ini juga bertujuan untuk pencapaian agenda SDGs ke-6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi layak, dengan harapan menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. UNICEF mengimplementasikan program WASH dengan tujuan untuk mempercepat penyediaan layanan akses sanitasi dan air bersih, yang dikelola dengan aman dan mencakup penghapusan buang air besar sembarangan di daerah-daerah yang menantang, dukungan analisis investasi

WASH untuk fasilitas kesehatan dan keterlibatan sektor swasta untuk mempercepat akses WASH di Sulawesi Selatan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.<sup>21</sup> Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk memahami sebuah interaksi sosial yang membutuhkan pemahaman yang mendalam dan kepekaan yang tinggi terhadap segala makna yang tersirat dalam setiap interaksi sosial. Metode ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk menganalisis peran UNICEF dalam implementasi program WASH di Sulawesi Selatan, yang melibatkan interaksi kompleks antara organisasi internasional, pemerintah lokal, dan masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui metode analisis dokumen, yaitu prosedur sistematis untuk meninjau atau mengevaluasi dokumen baik materi cetak maupun elektronik (berbasis komputer dan ditransmisikan melalui internet).<sup>22</sup> Seperti metode analitik lainnya dalam penelitian kualitatif, analisis dokumen mensyaratkan bahwa data diperiksa dan ditafsirkan untuk

---

<sup>20</sup> "Take Action for the Sustainable Development Goal," *Un.Org*.

---

<sup>21</sup> Jozef Raco, "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya," 2010.

<sup>22</sup> Glenn A Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method," *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009): 27–40.

memperoleh makna, memperoleh pemahaman, dan mengembangkan pengetahuan empiris. Dalam prosesnya, penelitian ini memanfaatkan sumber informasi melalui buku elektronik (e-book), jurnal yang telah dipublikasikan, artikel daring, dokumen dan laporan resmi dari UNICEF dan Pemerintah Sulawesi Selatan, serta data yang tersedia secara resmi di situs web pemerintahan atau lembaga non-pemerintah.

Sementara itu, data primer diperoleh melalui proses wawancara yang dilakukan kepada pihak UNICEF Nasional dan UNICEF Makassar sebagai objek penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang terlibat dalam implementasi program WASH di Sulawesi Selatan, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan mendalam tentang pelaksanaan program tersebut.

Untuk menjadikan penelitian ini lebih fokus dan terarah, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang mencakup peran UNICEF dalam mengatasi permasalahan sanitasi di Sulawesi Selatan pada tahun 2020-2024. Pemilihan tahun 2020 sebagai awal periode penelitian didasarkan pada fakta bahwa pada tahun tersebut, Indonesia ditetapkan terkena wabah virus COVID-19 yang memberikan dampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk penanganan masalah sanitasi dan air bersih. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi dampak-dampak yang ditimbulkan apabila krisis air bersih terus berlanjut di Sulawesi Selatan, serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan dan

mempercepat krisis air bersih di wilayah tersebut.

Dengan pendekatan metodologis dan ruang lingkup yang telah ditentukan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif tentang implementasi program WASH oleh UNICEF di Sulawesi Selatan, serta kontribusinya terhadap peningkatan akses sanitasi dan air bersih bagi masyarakat, khususnya anak-anak di wilayah tersebut.

## Analisis

United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan salah satu organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki peranan penting dalam pemenuhan hak anak di dunia. Didirikan pada 11 Desember 1946 melalui resolusi 57 (1) dari Sidang Umum PBB dengan nama awal United Nations International Children's Emergency Fund, organisasi ini awalnya dibentuk sebagai dana bantuan sementara PBB untuk memberikan bantuan persediaan makanan darurat dan perawatan kesehatan bagi ibu dan anak di negara-negara yang terkena dampak Perang Dunia II.<sup>23</sup> Pada masa-masa awal tersebut, anak-anak menjadi kelompok paling rentan menghadapi berbagai permasalahan seperti cacat fisik akibat pertempuran, ketakutan, kelaparan, penyakit, bahkan kekerasan seksual. Atas dasar keprihatinan inilah UNICEF membantu upaya pemulihan kondisi anak-anak korban perang melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti

---

<sup>23</sup> Martina Tomassini and Ruthia Yi, "UNICEF: History of a Logo," *Unicef*.

makanan, pakaian, dan pelayanan kesehatan.<sup>24</sup>

Setelah tahun 1950, fokus UNICEF mulai beralih pada program-program umum untuk peningkatan kesejahteraan anak, terutama di negara-negara berkembang dan dalam situasi darurat.<sup>25</sup> Mengingat dampak positif jangka panjang dari kinerja UNICEF, pada Oktober 1953 Majelis Umum PBB memberikan mandat tanpa batas waktu kepada organisasi ini untuk membantu anak-anak dan remaja yang hidup dan masa depannya terancam.<sup>26</sup> PBB kemudian secara resmi menempatkan UNICEF dalam struktur kelembagaannya dengan nama baru United Nations Children's Fund, meskipun akronimnya tetap dipertahankan.<sup>27</sup> UNICEF kemudian menjadi satu-satunya badan PBB yang berkomitmen penuh menangani masalah anak di seluruh dunia dengan kantor pusat di New York, Amerika Serikat.

Pada tahun 1957, UNICEF mulai mengembangkan program nutrisi untuk meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelayanan kesehatan. Dua tahun kemudian, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Hak Anak yang menekankan hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan gizi. Strategi UNICEF saat itu mencakup pendidikan orang tua, penguatan pelayanan kesehatan di pedesaan, dan peningkatan sanitasi. Pada tahun 1961, fokus UNICEF meluas ke pendidikan global, termasuk pendidikan bagi anak-anak terpinggirkan, remaja putus sekolah, dan anak perempuan.

Tahun 1974 menjadi tonggak penting dengan dideklarasikannya "Emergency for Children" untuk menangani dampak krisis ekonomi, bencana alam, dan kelangkaan makanan. UNICEF memprioritaskan imunisasi dan layanan kesehatan untuk mengatasi kekurangan gizi dan penyakit di negara-negara terdampak. Kemudian pada 1982, UNICEF meluncurkan The Child Survival and Development Revolution untuk menurunkan angka kematian anak melalui teknik berbiaya rendah seperti imunisasi, promosi menyusui, dan terapi rehidrasi. Perkembangan signifikan lainnya terjadi pada 1989 ketika UNICEF berperan penting dalam penyusunan Konvensi Hak Anak yang menjadi perjanjian hak asasi manusia paling banyak diratifikasi di dunia.

Di Indonesia, UNICEF mulai memberikan bantuan pada tahun 1948 berupa bantuan darurat untuk mencegah kelaparan akibat kekeringan di Lombok.<sup>28</sup> Kerjasama resmi antara Indonesia dan UNICEF dimulai pada tahun 1950, dengan komitmen untuk membantu memperbaiki kehidupan anak-anak dan keluarga di Indonesia, terutama berfokus pada perbaikan gizi dan bantuan kemanusiaan. Ketika pemerintah Indonesia meluncurkan Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama pada 1969, UNICEF bersama organisasi PBB lainnya terlibat dalam memberikan bantuan teknis.<sup>29</sup> Sejak saat itu, keterlibatan UNICEF di Indonesia semakin berkembang dan mencakup area program yang lebih luas

<sup>24</sup> Karen Mingst, "International Organization: UNICEF," *Britannica*.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Tomassini and Yi, "UNICEF: History of a Logo."

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> UNICEF Indonesia, *Kronologi Sejarah UNICEF Di Indonesia*, 2006.

<sup>29</sup> Unicef Indonesia, "Tentang Kami,"

<https://www.unicef.org/indonesia/id/tentang-kami>.

untuk membantu mewujudkan hak-hak anak dan perempuan.

Sebagai organisasi yang berfokus pada kesejahteraan anak, UNICEF memiliki visi untuk mewujudkan dunia di mana hak-hak setiap anak dapat terpenuhi dengan baik. Semua program yang dijalankan bertujuan menciptakan dunia di mana semua anak mendapatkan kesetaraan dan kesempatan yang sama untuk tempat tinggal yang aman, pendidikan, nutrisi yang baik, dan perlindungan dari bencana maupun konflik. Visi ini didukung dengan misi yang jelas, antara lain mengadvokasi perlindungan hak anak, membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka, memperluas kesempatan untuk mencapai potensi penuh, serta menetapkan hak-hak anak sebagai prinsip etika abadi dan standar perilaku internasional.<sup>30</sup>

Dalam menjalankan mandatnya, UNICEF memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik. Struktur tertinggi adalah Badan Eksekutif yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB untuk memberikan dukungan dan pengawasan antar pemerintah untuk program-program UNICEF. Badan ini terdiri dari 36 Negara Anggota yang mewakili lima kelompok regional negara anggota PBB.<sup>31</sup> Badan Eksekutif bertemu tiga kali setiap tahun dan bertugas melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh Majelis Umum, memberikan panduan terhadap kinerja UNICEF, memastikan konsistensi kegiatan dengan pedoman

kebijakan, memantau kinerja UNICEF, serta menyetujui program dan anggaran.<sup>32</sup>

Di bawah Badan Eksekutif terdapat Biro yang terdiri dari Presiden dan empat Wakil Presiden, yang masing-masing mewakili salah satu dari lima kelompok regional. Biro berfungsi sebagai jembatan antara sekretariat UNICEF dan kelompok-kelompok regional yang diwakili.<sup>33</sup> Pengelolaan operasional UNICEF dilakukan oleh Direktur Eksekutif yang dipilih oleh Sekretaris Jenderal PBB.<sup>34</sup> Dalam tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh empat wakil direktur eksekutif.

Struktur berikutnya adalah Kantor Sekretaris Badan Eksekutif yang bertanggung jawab menjaga hubungan efektif antara Badan Eksekutif dan sekretariat UNICEF.<sup>35</sup> Kemudian ada Management Team yang bertugas memastikan penggunaan terbaik aset UNICEF sejalan dengan praktik manajemen yang baik, prioritas kantor, dan tujuan untuk memberikan hasil bagi anak-anak. Programmes Team bertanggung jawab melaksanakan kebijakan penerapan program-program UNICEF, sedangkan External Relations Team membantu mengembangkan dan menerapkan kebijakan hubungan eksternal UNICEF dengan pemerintah, NGO, badan-badan PBB, dan masyarakat.

---

<sup>30</sup> UNICEF, "UNICEF Mission Statement."

<sup>31</sup> UNICEF, "The UNICEF Executive Board Membership," <https://www.unicef.org/executiveboard/membership>.

---

<sup>32</sup> UNICEF, "UNICEF Executive Board: An Informal Guide,"

<sup>33</sup> UNICEF, "Bureau : The UNICEF Executive Board Bureau," <https://www.unicef.org/executiveboard/bureau>.

<sup>34</sup> Ibid. Hal.6.

<sup>35</sup> UNICEF, "Board Secretariat," <https://www.unicef.org/executiveboard/board-secretariat>.

Sebagai organisasi global, UNICEF bekerja di lebih dari 190 negara dan wilayah melalui 157 program negara di berbagai bidang seperti perkembangan remaja, komunikasi untuk pembangunan, perlindungan anak, perkembangan anak usia dini, pendidikan, kesetaraan gender, kesehatan, HIV/AIDS, nutrisi, kebijakan sosial, serta air, sanitasi, dan kebersihan.<sup>36</sup> Dalam menjalankan programnya, UNICEF bermitra dengan berbagai pihak termasuk sektor publik (pemerintah, mitra multilateral, dan badan-badan PBB), sektor swasta (korporasi, filantropi, dan yayasan), serta masyarakat sipil (organisasi non-pemerintah, organisasi berbasis komunitas, gerakan sosial, dan kelompok lainnya).

Pendanaan UNICEF berasal dari sumbangan sukarela dari pemerintah, organisasi antar pemerintah, yayasan, sektor swasta, dan individu.<sup>37</sup> Sumber dana UNICEF terbagi menjadi tiga kategori utama: Sumber Dana Reguler (sumbangan tanpa syarat yang dapat dialokasikan sewaktu-waktu untuk bantuan kemanusiaan), Sumber Dana Reguler Lain (sumbangan untuk tujuan spesifik seperti program non-darurat), dan Sumber Dana Darurat (khusus untuk kebutuhan darurat).

Salah satu program utama UNICEF yang relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah program Water, Sanitation and Hygiene (WASH). Program ini sejalan dengan poin ke-6 SDGs yaitu air dan sanitasi yang layak, yang mencakup 8 target dan 11 indikator.<sup>46</sup>

<sup>36</sup> UNICEF, "UNICEF Job Functions: Programmes," <https://www.unicef.org/careers/unicef-job-functions-programmes>.

<sup>37</sup> UNICEF, "Funding to UNICEF," <https://www.unicef.org/partnerships/funding>.

UNICEF berfokus pada indikator 6.1 (air minum yang aman dan terjangkau) dan 6.2 (mengakhiri buang air besar sembarangan dan menyediakan akses terhadap sanitasi dan kebersihan), karena keduanya mencakup aspek sanitasi dan akses air bersih.

Di Indonesia, program WASH berawal dari dukungan UNICEF terhadap bencana tsunami di Aceh tahun 2004, yang kemudian diperluas ke daerah Indonesia Timur termasuk Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan layanan air minum dan sanitasi yang layak, sehingga dapat menurunkan angka penyakit diare dan stunting, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Program WASH terdiri dari dua komponen utama: WASH in Community (peningkatan akses air dan sanitasi di masyarakat) dan WASH in Institution (peningkatan akses air dan sanitasi di sekolah dan pusat kesehatan masyarakat).

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah operasional UNICEF yang masih menghadapi tantangan signifikan terkait sanitasi, akses air bersih, dan prevalensi stunting. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, 95% rumah tangga di provinsi ini memiliki akses terhadap sanitasi layak, dengan 8% di antaranya memiliki akses terhadap sanitasi aman. Meskipun demikian, masih terdapat ketimpangan akses berdasarkan tingkat pendapatan dan lokasi tempat tinggal, yang menunjukkan pentingnya integrasi prinsip keadilan dalam kebijakan dan praktik sanitasi.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Badan Pusat Statistik, "Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi Dan Memiliki Akses

Mengenai prevalensi stunting, data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa angka stunting di Sulawesi Selatan mencapai 27,4% pada tahun 2021, sedikit menurun menjadi 27,2% pada tahun 2022, namun kembali naik ke 27,4% pada tahun 2023. Angka ini masih jauh di atas rata-rata nasional dan menunjukkan perlunya upaya lebih intensif untuk menurunkan prevalensi stunting sesuai target nasional sebesar 14% pada tahun 2024.

Pentingnya sanitasi ini menjadikannya sebagai salah satu tujuan pembangunan. Melalui tujuan ke-6 Sustainable Development Goals (SDGs), masyarakat internasional bertujuan untuk mencapai akses universal dan merata ke air minum yang aman dan sanitasi yang memadai, serta menghentikan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tahun 2030. Berdasarkan data dari Joint Monitoring Project tahun 2017, terdapat 2 miliar penduduk yang belum memiliki akses setidaknya pada layanan sanitasi dasar, 673 juta dari jumlah tersebut masih melakukan praktik BABS di tempat terbuka.<sup>39</sup>

Berdasarkan data dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019, penduduk dengan akses terhadap

---

Terhadap Sanitasi Layak (Persen), 2024,” *Bps.Go.Id*, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/2/ODQ3IzI=/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-memiliki-akses-terhadap-sanitasi-layak.html>.

<sup>39</sup> UNICEF and WHO, “Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2000-2017 Special Focus on Inequalities, Launch Version July 12 Main Report Progress on Drinking Water Sanitation and Hygiene,” 2019.

sanitasi yang layak dalam hal ini jamban sehat, hingga tahun 2019 baru mencapai 72,7%. Sementara untuk sarana air minum yang memadai, sekitar 87,8% penduduk telah terlayani.<sup>40</sup> Meskipun angka ini relatif tinggi, masih terdapat kesenjangan akses di beberapa wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil dan pedesaan yang masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur sanitasi dan distribusi air bersih.

Data menunjukkan bahwa terdapat 2.200.109 jumlah Kartu Keluarga (KK) di Provinsi Sulawesi Selatan. Akses rumah tangga masyarakat Sulsel terhadap fasilitas sanitasi layak (jamban sehat) menyentuh angka 97,56% dengan jumlah KK sebanyak 2.146.481. Artinya masih terdapat sebanyak 53.628 KK yang sama sekali tidak memiliki akses fasilitas sanitasi layak.

Menurut data dari Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020, sebagian besar rumah tangga di Sulsel sudah memiliki fasilitas jamban pribadi, mencapai 86,07%. Terdapat juga sebagian masyarakat Sulawesi Selatan yang menggunakan fasilitas BAB bersama dengan tetangga sebesar 7,71%. Hal tersebut merupakan peningkatan yang signifikan jika dilihat dari kondisi kepemilikan fasilitas jamban pribadi tahun-tahun sebelumnya. Namun, masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki fasilitas BAB pribadi sekitar 1,17%, sehingga mereka menggunakan toilet umum/komunal. Yang lebih memprihatinkan, masih terdapat 4,87% masyarakat Sulsel yang tidak memiliki

---

<sup>40</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, “Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2019,” 2019.

fasilitas BAB sama sekali, sehingga masih melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Praktik BABS ini berpotensi terjadi di berbagai lokasi seperti ladang, semak-semak, hutan, parit, jalanan, sungai, atau area terbuka lainnya.<sup>41</sup> Dalam hal ketersediaan air bersih, menurut data dari Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2020, dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Sulsel rata-rata menggunakan air yang berasal dari sumur terlindung sebesar 12,35% dan menggunakan air kemasan bermerk/isi ulang sebesar 35,75%. Namun masih terdapat masyarakat Sulsel yang tidak dapat mengakses air bersih, sehingga 1,29% masyarakat mengandalkan air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi), dan 11,33% menggunakan mata air tak terlindung.

Air permukaan seperti sungai sudah banyak terkontaminasi oleh tinja manusia akibat perilaku BABS. Akibatnya, sungai menjadi tercemar dan berkurang kualitasnya karena berbagai bakteri yang menyebabkan penyakit seperti diare. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa terdapat 70% sumber air minum rumah tangga yang diuji di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan tercemar oleh tinja.

Kondisi sanitasi yang buruk dan ketersediaan air bersih yang terbatas berdampak luas bagi masyarakat, terutama anak-anak. Sekitar 90% orang terhubung dengan fasilitas sanitasi yang buruk yang

dapat mencemari lingkungan dan memberikan dampak negatif bagi anggota rumah tangga, dengan anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan. Menurut laporan UNICEF tahun 2019, terdapat tiga dampak secara umum yang diakibatkan oleh buruknya sanitasi, yaitu dampak kesehatan dan lingkungan, kesejahteraan ekonomi, dan pendidikan.

Dampak ekonomi dari buruknya sanitasi dan air bersih di Sulawesi Selatan terlihat dalam beberapa aspek. Berdasarkan laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), biaya yang dikeluarkan akibat buruknya sanitasi dan air bersih di Indonesia mencapai sekitar 56 triliun rupiah setiap tahunnya.<sup>42</sup> Angka ini mencakup biaya perawatan kesehatan, kehilangan produktivitas akibat penyakit, serta hilangnya potensi pendapatan akibat gangguan pertumbuhan seperti stunting yang memengaruhi kemampuan kognitif dan produktivitas di masa depan.

Keluarga yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang buruk harus mengeluarkan biaya lebih untuk perawatan kesehatan akibat penyakit dari lingkungan yang tidak bersih, seperti diare dan penyakit kulit. Selain itu, penyakit yang disebabkan oleh sanitasi buruk menyebabkan berkurangnya produktivitas kerja karena anggota keluarga yang sakit, khususnya anak-anak, membutuhkan perawatan, sehingga orang tua harus mengambil cuti atau mengurangi jam kerja mereka.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> UNICEF Indonesia, “Air, Sanitasi Dan Kebersihan (WASH),”  
<https://www.unicef.org/indonesia/id/air-sanitasi-dan-kebersihan-wash>.

---

<sup>42</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “LAPORAN KINERJA DIREKTORAT SANITASI 2023,” 2024.

<sup>43</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, “Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka,” 2021.

Lingkungan dengan sanitasi buruk juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit parasit, seperti infeksi cacing usus, yang menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi pada anak-anak. Akibatnya, anak-anak yang terinfeksi cacing mengalami gangguan pertumbuhan yang mengarah pada stunting. Menurut Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2020, prevalensi stunting di Sulawesi Selatan mencapai 30,2%, jauh di atas ambang batas yang ditetapkan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan sanitasi dan ketersediaan air bersih, Pemerintah Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai upaya sebelum berkolaborasi dengan UNICEF. Salah satunya adalah implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang dimulai pada tahun 2008. Program ini bertujuan meningkatkan akses air minum dan sanitasi di daerah pedesaan, dengan pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator untuk mendorong masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan proyek penyediaan air bersih serta pembangunan fasilitas sanitasi.

Di perkotaan seperti Makassar, pemerintah juga berupaya memperbaiki infrastruktur sanitasi dengan membangun sistem drainase dan pengolahan limbah. Namun, dengan populasi yang terus bertambah, kapasitas infrastruktur sanitasi yang ada menjadi kurang memadai, sehingga masih terdapat wilayah-wilayah yang belum terlayani dengan baik.<sup>44</sup>

UNICEF sebagai organisasi internasional berperan sebagai aktor

independen yang memiliki otonomi untuk bertindak dan mengambil keputusan yang stabil dan koheren sesuai dengan batas-batasnya. Dalam menjalankan perannya di Sulawesi Selatan, UNICEF memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh para anggotanya, termasuk Indonesia. Program-program yang dirancang UNICEF berdasarkan pada kerangka dan konsep yang dibentuk tanpa pengaruh dari negara atau pihak manapun, sesuai dengan karakteristik organisasi internasional menurut Clive Archer. Dalam implementasinya, UNICEF bekerja sama dengan berbagai pihak, baik masyarakat, pemerintah, dan lembaga sosial, serta melibatkan relawan Indonesia untuk membantu dalam upaya perlindungan anak.

Kerjasama UNICEF dengan Indonesia di Sulawesi Selatan untuk periode 2020-2024 memiliki tujuan utama mempercepat realisasi hak anak, mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya pada poin ke-6, serta mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020-2024. Kerjasama ini juga mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan periode 2018-2023.

Bapak Wildan, Officer WASH UNICEF Makassar, menjelaskan bahwa program WASH di Sulawesi Selatan fokus pada pengembangan kebijakan, peningkatan kapasitas sistem kelembagaan inovasi, komunikasi perubahan perilaku, serta kemitraan untuk meningkatkan akses terhadap layanan WASH.<sup>61</sup> Implementasi program WASH ini berlandaskan pada berbagai kerangka hukum, termasuk

---

<sup>44</sup> Ibid.

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, Sustainable Development Goals, UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1), UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dan Peraturan Presiden No. 185 Tahun 2014.

Dalam proses pelaksanaannya, UNICEF menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan minimnya infrastruktur sanitasi yang memadai, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Hambatan finansial juga memengaruhi berbagai sektor seperti pendidikan dan kesehatan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wildan selaku Kepala Teknis Officer Program WASH UNICEF Makassar, "UNICEF atau lembaga UN lainnya harus bekerja dalam kerangka atau platform kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Sehingga di mana UNICEF itu bekerja, di mana kita implementasi program, itu selalu dalam koordinasi dan juga diawasi oleh pemerintah Indonesia. Sehingga apa yang menjadi target pemerintah dan UNICEF di tuang dalam country programme document, yang isi kerjasamanya di perbarui setiap 5 tahun."<sup>45</sup>

### A. Perencanaan

Program WASH yang dijalankan UNICEF di Sulawesi Selatan dimulai dengan sinkronisasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menetapkan target peningkatan akses sanitasi layak dan aman serta penghapusan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menempatkan manusia sebagai pelaku sentral dan penikmat hasil pembangunan

---

<sup>45</sup> Setiabudi Wildan, "Wawancara Dalam Jaringan (Online) via Zoom," 2025.

yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia. Pelaksanaan Pencapaian TPB telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.

Dalam penyusunan program, Bappenas bertugas mengidentifikasi tantangan pembangunan, menetapkan prioritas nasional, dan menentukan target yang ingin dicapai. Proses ini melibatkan banyak diskusi dan koordinasi, baik di tingkat kementerian/lembaga maupun dengan pemerintah daerah, termasuk UNICEF. Pada Desember 2020, Pokja PPAS Nasional menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Strategi Pencapaian Target akselerasi capaian bidang air minum dan sanitasi di tingkat kabupaten/kota.<sup>46</sup>

Implementasi program WASH di Sulawesi Selatan didasarkan pada *Country Programme Document (CPD)* dan *Country Programme Action Plan (CPAP)*. CPD merupakan dokumen internal UNICEF yang menjadi acuan strategis perencanaan lima tahunan yang disusun melalui mekanisme partisipatif yang melibatkan lintas pemangku kepentingan. Sedangkan CPAP adalah Rencana Program Kerja Sama lima tahunan yang disepakati oleh Pemerintah RI dan UNICEF, mendeskripsikan dasar hubungan, situasi anak, komponen program, manajemen program, anggaran indikatif, dan komitmen kedua belah pihak.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Pokja PPAS Nasional, "Kick Off Meeting Tahunan Pokja PPAS Nasional," 2022, <https://www.nawasis.org/portal/berita/read/ki ck-off-meeting-tahunan-pokja-ppas-nasionaltekankan-pentingnya-peran-provinsi-dalam-mencapai-target-air-minum-dan-sanitasi-aman/52466>.

<sup>47</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Kementerian Dalam

UNICEF juga bekerja dengan pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam mewujudkan sanitasi dan air bersih mengacu pada target RPJMD 2018-2023 yang mengusung visi "Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter" dengan salah satu misinya adalah "Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel" dengan meningkatkan akses sanitasi yang layak untuk mencapai sanitasi aman di tahun 2023. UNICEF melalui Yayasan BaKTI bersama Pemerintah Sulawesi Selatan memfasilitasi diskusi penyempurnaan dokumen RPJMD periode 2018-2023 untuk memastikan urusan pemenuhan hak dan perlindungan anak tercakup dalam dokumen tersebut.<sup>48</sup>

## B. Implementasi Program

Dalam implementasi program, UNICEF bekerjasama dengan mitra lokal untuk memastikan tindakan yang diambil tetap menghormati norma-norma dan praktik-praktik lokal masyarakat. Bentuk implementasi ini meliputi pembangunan kapasitas masyarakat dan pemantauan sebagai bagian dari program WASH untuk pembelajaran dan adaptasi. UNICEF fokus pada penyediaan akses air bersih melalui pembangunan sumur bor, sistem penampungan air hujan, dan fasilitas distribusi air bersih di desa-desa terpencil. Sanitasi juga diperbaiki dengan membangun

toilet umum, terutama di sekolah-sekolah dan fasilitas umum lainnya.<sup>49</sup>

Program WASH kerjasama UNICEF dan BaKTI bekerja mendukung percepatan sanitasi aman di Provinsi Sulawesi Selatan. Sanitasi layak diawali dengan pemisahan air kakus dengan sistem drainase setempat, serta memastikan tangki septik yang digunakan sesuai dengan standar nasional.<sup>50</sup> Pada Agustus hingga September 2022, UNICEF bersama Yayasan Bakti melakukan program rehabilitasi tangki septik yang bertujuan untuk menguatkan upaya sosialisasi tentang tangki septik kepad yang berstandar SNI di masyarakat.

UNICEF juga membantu dalam penyedotan lumpur tinja secara terjadwal, yang dikenal dengan istilah Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). Namun, pengelolaan air limbah domestik di Sulawesi Selatan sebagian besar masih dikerjakan melalui program Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (LLTTT). Untuk mendukung pengelolaan lumpur tinja, UNICEF membantu dalam pembuatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Air Limbah Domestik (SIMPALD) yang memungkinkan operator IPLT mempersiapkan peralatan yang diperlukan saat melakukan penyedotan.<sup>51</sup>

---

Negeri, "Pedoman Umum Pelaksanaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia Dengan UNICEF Periode 2021-2025," 2021.

<sup>48</sup> Yayasan Bakti, "Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023," 2019, <https://bakti.or.id/kegiatan/dokumen-rpjmd-provinsi-sulawesi-selatan-tahun-2018-2023>.

---

<sup>49</sup> Halia Asriyani, "Perjalanan Menuju Sanitasi Aman Di Provinsi Sulawesi Selatan," *Yayasan Bakti*, 2022, <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/perjalanan-menuju-sanitasi-aman-di-provinsisulawesi-selatan>.

<sup>50</sup> Workshop Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi, "Sinergitas Perencanaan Dalam Implementasi Pembangunan Sanitasi," 2022.

<sup>51</sup> Asriyani, "Upaya Mewujudkan Sanitasi Aman Di Provinsi Sulawesi Selatan Bersama Program

Setelah penyedotan lumpur tinja dilakukan, lumpur akan dibawa menuju Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan, 16 memiliki IPLT, tetapi tidak semuanya berfungsi optimal. Beberapa fasilitas memerlukan perbaikan fisik dan peningkatan sistem pengelolaan.

Program WASH juga mendorong keterlibatan komunitas dalam pengelolaan sumber daya air dan sanitasi. UNICEF membantu membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang bertugas memantau dan memelihara infrastruktur yang dibangun. Kelompok ini dilatih untuk mengelola fasilitas air dan sanitasi secara berkelanjutan. UNICEF berkolaborasi mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran seputar isu sanitasi, secara aktif melibatkan generasi muda dan pemangku kepentingan.

*Inspection Tools* merupakan instrumen untuk memantau akses air dan sanitasi, terutama kondisi tangki septik rumah tangga di masyarakat. Melalui pelatihan ini, sanitarian dan pengelola air limbah domestik mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru mengenai strategi kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan implementasi sanitasi aman di Kabupaten Pinrang.<sup>52</sup>

Sejak tahun 2018, program WASH kerjasama UNICEF dan Yayasan BaKTI memberikan dukungan fasilitasi pembelajaran horizontal tentang pemanfaatan dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk pembangunan

sarana akses air dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 2022 diadakan pertemuan antara Bupati Barru, Pokja PKP, BAZNAS, dan Kanaan Nadar, Direktur Program WASH Unicef Indonesia, untuk mengidentifikasi isu prioritas untuk pembangunan air dan sanitasi aman di Barru.<sup>53</sup>

UNICEF juga memberikan perhatian khusus pada layanan WASH di fasilitas kesehatan. Sebagai contoh, program perbaikan fasilitas kesehatan di Puskesmas Moncobalang, Kabupaten Gowa, yang berfokus pada penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang inklusif, dengan fokus pada fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas dan perempuan.<sup>77,78</sup> Program ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan di puskesmas, seperti pembangunan toilet ramah gender dan disabilitas, serta pemasangan menara air. UNICEF dan mitra juga menerapkan peningkatan kapasitas dengan total anggaran Rp344.994.655, yang digunakan untuk rehabilitasi 26 puskesmas di Gowa.<sup>54</sup>

### C. Monitoring dan Evaluasi

Dalam monitoring dan evaluasi program, Kepala Program WASH UNICEF Nasional menyampaikan bahwa evaluasi

---

Wash Kerja Sama Unicef Dan Yayasan Bakti (Yayasan BaKTI, 2022).”

<sup>52</sup> Ibid.

---

<sup>53</sup> Admin Bakti, “Program Kerja Sama Unicef - BaKTI Untuk Perlindungan Anak Dan WASH,” .

<sup>54</sup> Sari, “Puskesmas Moncobalang Miliki Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Ramah Disabilitas Dan Perempuan, Hasil Program WASHFit,” *Ujungjari*, 2024, <https://www.ujungjari.com/2024/02/20/puskesmas-moncobalang-miliki-sarana-air-bersih-dansanitasi-ramah-disabilitas-dan-perempuan-hasil-program-washfit/>.

program dapat dilaksanakan pada pertengahan pelaksanaan program (*mid-term evaluation*) maupun di akhir program kerjasama (*final evaluation*). Evaluasi ini bertujuan untuk menilai atau mengukur capaian program, dampak program, efisiensi dan efektivitas pengelolaan program secara komprehensif.<sup>55</sup>

UNICEF juga membantu dalam pemutakhiran data secara berkelanjutan. Dengan dukungan Program WASH hasil kolaborasi UNICEF dan BaKTI, Pokja AMPL/PPAS Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Workshop Penggunaan Perangkat Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi di Sulawesi Selatan. Dari kegiatan ini, operator NAWASIS dari 12 kabupaten/kota mampu mengerjakan pemutakhiran data Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan data pemantauan dan pelaporan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ke dalam sistem NAWASIS.

Sebagai aktor independen, UNICEF memiliki kapasitas untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program yang sejalan dengan mandat kemanusiaannya tanpa intervensi dari agenda politik negara-negara anggotanya. Dalam konteks Sulawesi Selatan, peran independen ini tercermin dalam pendekatan proaktif yang berbasis bukti, di mana UNICEF menetapkan prioritas berdasarkan kebutuhan lokal yang

diidentifikasi melalui berbagai survei dan riset.

Meskipun demikian, UNICEF menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan program WASH di Sulawesi Selatan, mulai dari infrastruktur hingga sumber daya manusia. Adanya kesenjangan dalam ketersediaan infrastruktur dasar, seperti fasilitas sanitasi yang layak, sistem pengolahan air limbah, dan akses air bersih menjadi tantangan utama yang dihadapi.<sup>56</sup>

Kehadiran UNICEF sangat penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. UNICEF tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga bantuan teknis, seperti pelatihan SDM, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta kampanye kesadaran masyarakat yang efektif. Kolaborasi antara UNICEF dan pemerintah Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa program WASH dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.

## Simpulan

UNICEF sebagai organisasi internasional berperan signifikan dan independen dalam implementasi program WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) di Sulawesi Selatan, dengan tujuan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-6, yaitu memastikan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak bagi semua pada tahun 2030. Sanitasi dan air

---

<sup>55</sup> Cyntya (Kepala Program WASH UNICEF Indonesia), "Wawancara Dalam Jaringan (Online) via Zoom," 2024.

---

<sup>56</sup> Jane Doe, "Challenges in WASH Implementation in Developing Regions," *Journal of Water Policy* 12, no. 3 (2021): 34–45.

bersih menjadi isu krusial yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, terutama di wilayah dengan keterbatasan fasilitas seperti Sulawesi Selatan. Melalui kemitraan strategis dengan pemerintah, UNICEF mendorong penghapusan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS), peningkatan akses sanitasi layak, serta tercapainya sanitasi aman sesuai target RPJMN dan SDGs. Keberhasilan program ini ditandai dengan tercapainya status bebas BABS pada 2021, meskipun cakupan sanitasi aman masih rendah, yakni sekitar 12%, yang menuntut peningkatan upaya berkelanjutan. UNICEF memainkan peran penting dalam advokasi kebijakan, penguatan regulasi, serta pendampingan teknis bagi pemerintah daerah. Program ini juga mencakup edukasi masyarakat, pemberdayaan komunitas, dan penguatan sistem kelembagaan lokal, dengan fokus pada kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Meskipun UNICEF merupakan aktor independen, seluruh intervensinya dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah, memastikan keselarasan dengan prioritas nasional dan keberlanjutan jangka panjang. UNICEF juga menyesuaikan intervensi dengan RPJMN dan RPJMD sebagai panduan strategis pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam sektor sanitasi dan air bersih. Hasil dari kolaborasi ini menunjukkan bahwa UNICEF turut membantu Sulawesi Selatan mencapai target RPJMD pada 2021 dengan pencapaian sanitasi layak sebesar 91,57%, serta peningkatan sanitasi aman dari 4,74% pada 2020 menjadi 10,88% pada 2024, menempatkan pemerintah sebagai aktor

utama dan UNICEF sebagai fasilitator pembangunan berkelanjutan.

## Referensi

- Archer, Cliver. "International Organisations Third Edition Clive Archer," 2001.
- Asriyani, Halia. "Perjalanan Menuju Sanitasi Aman Di Provinsi Sulawesi Selatan." *Yayasan Bakti*, 2022. <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/perjalanan-menuju-sanitasi-aman-di-provinsisulawesi-selatan>.
- . "Upaya Mewujudkan Sanitasi Aman Di Provinsi Sulawesi Selatan Bersama Program Wash Kerja Sama Unicef Dan Yayasan Bakti (Yayasan BaKTI, 2022)," 2022, 1–5.
- Badan Pusat Statistik. "Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi Dan Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (Persen), 2024." *Bps.Go.Id*, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/2/ODQ3IzI=/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-memiliki-akses-terhadapsanitasi-layak.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. "Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka," 2021.
- . "Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2019," 2019.
- Bakry, U S. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*. Prenadamedia Group, 2017.
- Bakti, Admin. "Program Kerja Sama Unicef - BaKTI Untuk Perlindungan Anak Dan WASH," n.d.
- Banyu, Anak Agung, and Yanyan Mochamad Yani Perwita. *Pengantar Ilmu HUBungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2005.
- Bennett, A L R. *International Organizations: Principles and Issues*. Prentice-Hall Internat, 1991.

- Bowen, Glenn A. "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009): 27–40.
- Couloumbis, Theodore A, and James H Wolfe. *Introduction to International Relations : Power and Justice*. Prentice Hall Englewood Cliffs, N.J, 1990.
- Cyntya (Kepala Program WASH UNICEF Indonesia). "Wawancara Dalam Jaringan (Online) via Zoom." 2024.
- Doe, Jane. "Challenges in WASH Implementation in Developing Regions." *Journal of Water Policy* 12, no. 3 (2021): 34–45.
- ICLEI BRIEFING SHEET. "From MDGs to SDGs: What Are the Sustainable Development Goals?," 2015.
- Kemendes RI Ditjen P2P. "Profil Kesehatan Indo-Nesia," 2021. <https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/profil-kesehatanindonesia/Profil-Kesehatan-2021.pdf>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "World Health Organization (WHO)," n.d.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "LAPORAN KINERJA DIREKTORAT SANITASI 2023," 2024.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Kementerian Dalam Negeri. "Pedoman Umum Pelaksanaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia Dengan UNICEF Periode 2021-2025," 2021.
- Mingst, Karen. "International Organization: UNICEF." *Britannica*, n.d.
- National Geographic Indonesia. "Air Sungai Di Indonesia Tercemar Berat," 2016.
- Olivia, Yessi. "Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional." *Jurnal Transnasional* 4, no. 1 (2013): 896–914.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. "Laporan Semester 1 Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Selatan," 2024.
- Pokja PPAS Nasional. "Kick Off Meeting Tahunan Pokja PPAS Nasional," 2022. <https://www.nawasis.org/portal/berita/read/kick-off-meeting-tahunan-pokja-ppas-nasionaltekanan-pentingnya-peran-provinsi-dalam-mencapai-target-air-minum-dan-sanitasi-aman/52466>.
- Raco, Jozef. "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya," 2010.
- REACH. "REACH Global Strategy 2020-2024," 2020. [www.reachwater.org.uk](http://www.reachwater.org.uk).
- Sari. "Puskesmas Moncobalang Miliki Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Ramah Disabilitas Dan Perempuan, Hasil Program WASHFit." *Ujungjari*, 2024. <https://www.ujungjari.com/2024/02/20/puskesmas-moncobalang-miliki-sarana-air-bersih-dansanitasi-ramah-disabilitas-dan-perempuan-hasil-program-washfit/>.
- Siswanto, Hadi. "Kamus Populer Kesehatan Lingkungan," 2003.
- un.org. "Take Action for the Sustainable Development Goal," n.d.
- Tomassini, Martina, and Ruthia Yi. "UNICEF: History of a Logo." *Unicef*, n.d.
- UNICEF. "Board Secretariat," n.d. <https://www.unicef.org/executiveboard/board-secretariat>.
- . "Bureau : The UNICEF Executive Board Bureau," n.d. <https://www.unicef.org/executiveboard/bureau>.
- . "Funding to UNICEF," n.d. <https://www.unicef.org/partnerships/funding>.
- . "The UNICEF Executive Board Membership," n.d. <https://www.unicef.org/executiveboard/membership>.

- . “UNICEF Executive Board: An Informal Guide,” n.d.
- . “UNICEF Job Functions: Programmes,” n.d. <https://www.unicef.org/careers/unicef-job-functions-programmes>.
- . “UNICEF Mission Statement,” 2024. <https://www.unicef.org/aboutus/mission-statement>.
- Unicef Indonesia. “Hari Toilet Sedunia 2020: Sanitasi Aman Dan Berkelanjutan Di Tengah Iklim Yang Berubah,” 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/id/cerita/hari-toilet-sedunia-2020-sanitasi-aman-dan-berkelanjutan-di-tengah-iklim-yang-berubah>.
- . “Tentang Kami,” n.d. <https://www.unicef.org/indonesia/id/tentang-kami>.
- UNICEF Indonesia. “Air, Sanitasi Dan Kebersihan (WASH),” n.d. <https://www.unicef.org/indonesia/id/air-sanitasi-dan-kebersihan-wash>.
- . *Kronologi Sejarah UNICEF Di Indonesia*, 2006.
- UNICEF, and WHO. “Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2000-2017 Special Focus on Inequalities, Launch Version July 12 Main Report Progress on Drinking Water Sanitation and Hygiene,” 2019.
- United Nations. “The Sustainable Development Goals Report 2022,” 2022.
- Wildan, Setiabudi. “Wawancara Dalam Jaringan (Online) via Zoom,” 2025.
- Workshop Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi. “Sinergitas Perencanaan Dalam Implementasi Pembangunan Sanitasi,” 2022.
- World Health Organization. “Drinking-Water,” 2023.
- Yayasan Bakti. “Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023,” 2019. <https://bakti.or.id/kegiatan/dokumen-rpjmd-provinsi-sulawesi-selatan-tahun-2018-2023>.